

**PENGARUH RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI
(STUDI PADA KPP MULYOREJO SURABAYA)**

Dr. Yoosita Aulia, SE., MM., Ak., CA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email : yoosita.aulia@gmail.com

Innaka Silvy Adi Windha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email : silvyadi96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, moderasi sosialisasi perpajakan pada pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dan moderasi sosialisasi perpajakan pada pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo, Surabaya. Populasi dari penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, serta teknik analisis yang digunakan analisis regresi moderasi dalam SPSS V.22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

Kata kunci : Restitusi PPN, Jumlah PKP, Penerimaan PPN, dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan

1. PENDAHULUAN

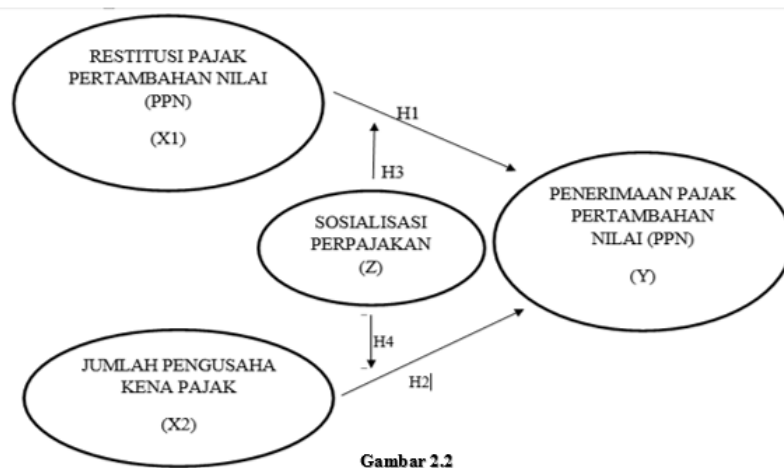
Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Secara hukum, pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat yang wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, dan pajak dipungut untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam segala bidang. Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apabila di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dibayarkan nominalnya Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka akan terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dapat diartikan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ada dua jenis proses Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yaitu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak dengan Kriteria Tertentu dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat didefinisikan bahwa wajib pajak yang membayarkan pajaknya berupa Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang nanti pajaknya dapat masuk sebagai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat guna untuk pembangunan negara. Untuk dapat mewujudkan itu maka pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan itu sendiri diartikan sebagai penambahan wawasan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi paham akan aturan yang berlaku saat ini dan paham akan

prosedur tata cara mengajukan proses restitusi, dokumen apa saja yang diajukan untuk restitusi. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan susahnyanya mengurus restitusi Pajak Pertambahan Nilai kepada KemenKeu pada bulan Desember 2018.

Kerangka Teoritis Dan Perumusan Hipotesis

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengganti pajak penjualan karena Pajak penjualan dianggap sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran pembangunan misalnya mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. Waluyo (2011) berpendapat bahwa PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. UU No.28 tahun 2007 menyatakan bahwa di dalam pajak pertambahan nilai apabila jumlah pajak masukan yang dibayarkan oleh PKP lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi restitusi PPN. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak itu sendiri adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dapat menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah penerimaan pajak yang didapatkan dari pihak ketiga yang artinya pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan melalui pihak ketiga dan untuk kegiatan pembangunan negara. Fany (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang perpajakan lebih mendalam dan detail, misalnya bagaimana prosedurnya dan tata cara membayar pajak berapa besar tarifnya.

Berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan di atas maka terbentuk kerangka konseptual penelitian ini. Dalam penelitian ini adalah yang mengenai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan adanya variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel yang dipengaruhi terhadap variabel yang memengaruhi tersebut. Dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti oleh peneliti yaitu : Restitusi PPN, jumlah PKP sebagai variabel independen lalu penerimaan PPN sebagai variabel dependen dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.



Gambar 2.2

H1 : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H3 : sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

H4 : Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi tiga variabel yaitu Variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderasi. Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi variable lain dan dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai X1 dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai X2. Variabel terikat (Y) adalah variable yang dipengaruhi oleh variable lain, dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan variabel moderasinya (Z) adalah variable yang dapat memperkuat atau memperlemah variable bebas terhadap variable terikat, dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang ada di KPP Mulyorejo Surabaya dan cara pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah Pengusaha Kena Pajak yang sudah mempunyai NPWP dan yang sudah pernah melaporkan SPT Masa sebelumnya. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus dari (Bungin,2011:115) yaitu:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.235}{2.235 \cdot 0.10^2 + 1}$$

$$n = 95,7$$

(dibulatkan menjadi 96)

Keterangan :

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berada di KPP Mulyorejo, Surabaya dengan skala likert 6 yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Setuju, 4 = Cukup Setuju, 5 = Setuju, dan 6 = Sangat Setuju.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi. Berikut rumus persamaannya :

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 | X_1 - Z | + \beta_5 | X_2 - Z | + e$$

Keterangan :

Y = variabel penerimaan pajak pertambahan nilai

α = bilangan konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = restitusi Pajak Pertambahan Nilai

X_2 = jumlah Pengusaha Kena Pajak

Z = sosialisasi perpajakan

e = error

3. . HASIL DAN PEMBEHASAN PENELITIAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2016:147) berpendapat bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Tabel 3.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Restitusi PPN	96	12	31	21.21	4.444
Jumlah PKP	96	14	18	15.75	1.142
Penerimaan PPN	96	21	30	25.82	1.290
Sosialisasi Perpajakan	96	14	18	16.06	1.024
Valid N (listwise)	96				

**Analisis
Statistik
Deskriptif**

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi yaitu pada variabel penerimaan PPN yaitu sebesar 25,82, sedangkan yang terendah berada pada variabel jumlah PKP yaitu sebesar 15,75. Nilai standar deviasi tertinggi berada pada variabel restitusi PPN yaitu sebesar 4,444 dan yang terendah berada pada variabel sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 1,024.

2. Uji Kualitas Data

Untuk menggunakan metode analisis regresi moderasi data harus memenuhi uji kualitas data agar kuesioner yang kita sebarakan datanya valid.

2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51) sebagai berikut :

- Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka butir atau variabel tersebut valid.
- Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Tabel 3.2
Uji Validitas

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	nilai r tabel	Nilai sig	Keputusan
X1.1	0,403	0,202	0,000	Valid
X1.2	0,605	0,202	0,000	Valid
X1.3	0,909	0,202	0,000	Valid
X1.4	0,231	0,202	0,000	Valid
X1.5	0,519	0,202	0,000	Valid
X1.6	0,687	0,202	0,000	Valid
X1.7	0,877	0,202	0,000	Valid
X2.1	0,796	0,202	0,000	Valid
X2.2	0,914	0,202	0,000	Valid
X2.3	0,912	0,202	0,000	Valid
Y.1	0,507	0,202	0,000	Valid
Y.2	0,639	0,202	0,000	Valid
Y.3	0,570	0,202	0,000	Valid
Y.4	0,724	0,202	0,000	Valid
Y.5	0,809	0,202	0,000	Valid
Z.1	0,820	0,202	0,000	Valid

Z.2	0,659	0,202	0,000	Valid
Z.3	0,774	0,202	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018:45).

Tabel 3.3
Uji Reliabilitas

Indikator	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>		Keputusan
X1	0,720	0,70	Reliabel
X2	0,847	0,70	Reliabel
Y	0,793	0,70	Reliabel
Z	0,713	0,70	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

Selain melalui tahap uji kualitas data untuk menggunakan metode analisis regresi moderasi harus melalui uji asumsi klasik juga.

3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2018:161) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria:

- Apabila nilai signifikansi $\geq \alpha = 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal
- Apabila nilai signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ maka nilai residual berdistribusi tidak normal.

Tabel 3.4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.06209028
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.071
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.180

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,180 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018:107) menyatakan bahwa Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* $\leq 10,00$ dan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3.5
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.000		
Restitusi PPN	.000	.986	1.015
Jumlah PKP	.006	.986	1.015
Sosialisasi Perpajakan	.003	1.000	1.000

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji glejser apabila nilai $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3.6
Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.620	1.647		.376	.708
Restitusi PPN	-.013	.017	-.081	-.775	.440
Jumlah PKP	-.040	.067	-.062	-.595	.553
Sosialisasi Perpajakan	.066	.074	.092	.889	.376

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut terbukti tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Kriteria autokorelasi adalah :

1. $0 < d < dl$ tidak ada autokorelasi positif (ditolak)
2. $dl \leq d \leq du$ tidak adanya autokorelasi positif
3. $4 - dl < d < 4$ tidak ada autokorelasi negatif (ditolak)
4. $4-du \leq d \leq 4-dl$ tidak ada korelasi negatif
5. $du < d < 4-du$ tidak ada autokorelasi, positif atau negative (tidak ditolak)

Tabel 3.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.322	.300	1.079	1.742

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Restitusi PPN, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa du sebesar 1,602, d sebesar 1,742, dl sebesar 1,709. Maka dapat disimpulkan bahwa $du < d < 4-du$, $1.602 < 1.742 < 2.398$ = tidak ada autokorelasi (tidak ditolak).

4. Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Ghozali (2018:221) menyatakan bahwa variabel moderasi adalah variabel yang dapat memengaruhi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui adanya moderasi dapat di uji dengan uji nilai selisih mutlak (Ghozali, 2018:231). Berikut rumus persamaannya :

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot Z + \beta_4 | X_1 - Z | + \beta_5 | X_2 - Z | + e$$

Keterangan :

Y = variabel penerimaan pajak pertambahan nilai

α = bilangan konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = restitusi Pajak Pertambahan Nilai

X_2 = jumlah Pengusaha Kena Pajak

Z = sosialisasi perpajakan

e = error

Tabel 3.8
Analisis Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Adjusted R Square	Anova
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	26.176	.248		105.383	.000		
	Zscore: Restitusi PPN	-.561	.112	-.435	-5.010	.000		
	Zscore: Jumlah PKP	.348	.125	.270	2.783	.007		
	Zscore: Sosialisasi Perpajakan	.448	.119	.348	3.752	.000		
	Abs_X1Xz	-.063	.140	-.040	-.452	.006		
	Abs_X2Xz	.376	.163	.243	2.312	.023		
	Model Summary (R ²)						.324	
Anova (Uji F)							.000	

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel koefisien determinasi (R^2) di atas dapat kita simpulkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,324, hal ini berarti variabel penerimaan PPN sebesar 32,4% dapat dijelaskan oleh variabel $Z_{\text{restitusi PPN}}$, $Z_{\text{jumlah PKP}}$, $Z_{\text{sosialisasi perpajakan}}$, abs_X1xZ , dan abs_X2xZ . Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,6% dijelaskan oleh variabel inflasi. Tabel Anova (uji F) di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPN} = 26.176 - 0.561 \times \text{Restitusi PPN} + 0.348 \times \text{Jumlah PKP} + 0.448 \times \text{Sosialisasi Perpajakan} - 0.063 \mid \text{Restitusi PPN} - \text{Sosialisasi Perpajakan} \mid + 0.376 \mid \text{Jumlah PKP} - \text{Sosialisasi Perpajakan} \mid + e$$

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa restitusi PPN (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung restitusi PPN (X_1) mengarah ke arah yang negatif sebesar -5.010 sehingga restitusi PPN (X_1) berpengaruh secara negatif. Sehingga disimpulkan bahwa restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN

2. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah PKP (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung jumlah PKP (X_2) juga mengarah ke arah positif yang sebesar 2.783 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP (X_2) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

3. Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi $0,006 \leq 0,05$ namun dilihat dari t hitung mengarah ke arah yang negatif sebesar -0.452 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN.

4. Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel 4.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi $0,023 \leq 0,05$ dan dilihat dari t hitung mengarah ke arah yang positif sebesar 2.312 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Maka disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan agar lebih aktif melakukan sosialisasi perpajakan agar restitusi PPN semakin kecil dan jumlah PKP semakin tinggi sehingga penerimaan PPN juga meningkat.

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama disarankan untuk menambahkan variabel lain misalnya inflasi yang dapat memengaruhi penerimaan PPN dan mengganti definisi operasional variabel restitusi PPN yang nomor 1 menjadi wajib pajak mengetahui prosedur yang berlaku dalam pengurusan restitusi, yang nomor 2 menjadi dokumen untuk pengajuan restitusi sangat sederhana lalu yang nomor 3 menjadi pimpinan beserta petugas KPP senantiasa melakukan dan memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi.
3. Memperluas sampel penelitian untuk kepentingan generalisasi hasil penelitian.

5. REFRENSI

- Afifah, Dian Nur. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi pada KPP Pratama Karangpilang)*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Soetomo. Surabaya.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Wawasan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan bantuan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Cetakan ke IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Kartika Ratna & S. Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.2, Hal: 59-73, ISSN: 2355-9993, E-ISSN: 2527-953X.
- Herryanto, Marisa & A.A Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, Hal: 125-134.
- Lempas, Bryan S, T. Runtu & R. J. Pusung. 2017. Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Restitusi dan Kompensasi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.2, Hal: 694-702.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan metode analisis MRA dengan menggunakan bantuan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel *Moderating* terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol.XIV, No.2, Hal: 90-97.
- Liputan6, 2018, 29 Maret. *Sri Mulyani Percepat Pengembalian Lebih Bayar Pajak*. 2018. (Online). (<https://m.liputan6.com>, dishare oleh Fiki Ariyanti)
- Lubis, Farida Khairani. 2016. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan). *Wahana Inovasi*, Vol.5, No.2, Hal: 467-476, ISSN: 2089-8592.
- Mangundap, P. V & V.Z. Tirayoh. 2016. Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.1, Hal: 100-108, ISSN: 2303-1174.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Masithoh, Apik Aji. 2011. *Pengaruh Penambahan Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Noviani, Berlinda. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Octaviani, Sarah, Y. Mayowan & S. Karjo. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Studi pada PT.XYZ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.7, No.1, Hal: 1-8.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Prosedur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2018. (Online). (<http://www.ortax.org>, diakses 12 April 2018).
- Praciastuti, Nadya. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II)*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rebele, J. E & R.E. Michaels. 1990. Independent Auditors Role Stress : Antecedent, Outcome, and Moderating Variables, *Behavioral Research in Accounting*, Vol.2, Hal: 124-152.
- Renata, Almira Herna, K. Hidayat & B. Kaniskha. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.1, No.1, Hal: 1-9.
- Sianturi, Juventus. 2016. *Pengembalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Padang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supit, W.M, D. P. E. Saerang & H. Sabijono. 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, Vol.2, No.3, Hal: 159-166, ISSN: 2303-1174.
- Tantri, Lies Tania & Associates Registered Tax Consultant. 2014. *Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang telah Memenuhi Persyaratan Tertentu*. (Online). (<http://www.liestanis.co.id>, diakses 13 Mei 2014).
- Usman, Sarah. 2017. Proses Manajerial Pemeriksaan Restitusi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai KPP di Manokwari. *Jurnal Nusamba*, Vol.2, No.1, Hal: 57-66.
- Wulandari, Riski. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, Vol.1, No.1, Hal:87-102.
- Yusadi, Icha. 2018. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan*. Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area. Medan